

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	x
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF)</i>	16
1. Pengertian <i>Illegal Fishing</i>	16
2. Perkembangan <i>Illegal Fishing</i>	21
3. <i>Illegal Fishing</i> kaitannya dengan <i>overfishing</i>	26
B. Penegakan Hukum	29
C. Wilayah Pengelolaan Perikanan	32
D. Pengaturan Internasional yang Relevan dengan Pemberantasan IUUF	38
1. <i>United Nations Convention on the Law of the Sea 1982</i> (Konvensi Hukum Laut Internasional 1982)	38
2. <i>Internasional Regional Fisheries Management</i> <i>Organization (RFMO)</i>	43

3. <i>International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001</i>	46
4. <i>Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995</i>	51
5. <i>Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region 2007</i>	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Bahan atau Materi Penelitian	59
C. Lokasi Penelitian	61
D. Subjek Penelitian.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Jalannya Penelitian	62
G. Analisis Data	63
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	66
A. Perkembangan Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan <i>IUUF</i> di WPP RI.....	66
1. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Hukum Laut Indonesia Sebelum Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982	66
2. Perkembangan Pengaturan Hukum Laut Indonesia Setelah Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1985.....	72
3. Perkembangan Pengaturan Hukum Laut Indonesia beserta Penegakan Hukum terhadap Wilayah Perairan Indonesia pada masa sekarang	79
B. Penegakan Hukum yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Kapal Asing yang Melakukan <i>IUUF</i> di WPP RI Apakah Telah Sesuai dengan Prosedur Penegakan Hukum yang Diatur dalam Hukum Laut Internaasional	

(UNCLOS 1982)	93
1. Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	93
a. Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Indonesia.....	94
b. Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan <i>Illegal Fishing</i> di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.....	96
c. Penegakan Hukum Terhadap Awak Kapal Kapal Asing yang Melakukan <i>Illegal Fishing</i> di WPP RI.....	101
2. Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan, <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.....	108
a. Aparat Penegak Hukum Indonesia Terkait Kasus <i>Illegal Fishing</i>	108
b. Prosedur Penegakan Hukum Wilayah Perairan Indonesia dan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia....	116
1) Prosedur Penegakan Hukum Wilayah Perairan Indonesia	117
2) Prosedur Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	131
c. Prosedur Penangkapan Kapal Asing Yang Melakukan Praktek IUUFishing di Wilayah Laut Indonesia Menurut Hukum Nasional dan Internasional	136
1) Prosedur Penangkapan Kapal Asing Yang Melakukan Praktek IUUFishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia	

Menurut Hukum Nasional	136
2) Prosedur Penangkapan Kapal Asing Yang Melakukan Praktek IUUFishing di WPP RI Menurut Hukum Internasional	141
d. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Praktek IUUFishing di WPP RI	143
e. Kasus Penangkapan Kapal Berbendera Asing Yang Melakukan Praktek IUUFishing di WPP RI	150
BAB V PENUTUP	160
A. Kesimpulan	160
B. Saran	168
DAFTAR PUSTAKA	171
LAMPIRAN	177